

Dari Rimland ke Pivot Indo-Pasifik: Geopolitik, Geoekonomi, dan Geostrategi Negara-Negara Asia Tenggara (Studi Komparatif Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura)

Muhammad Pasha Fathurilham¹, Rifan Maulana², Zaki Maulana Abdullah³, Elly Nurlia⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email : mpashafathurilham01@gmail.com , Zakimaulana5544@gmail.com , walagasehrifan@gmail.com , ellynurlia@untirta.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana negara-negara Asia Tenggara mengonversi posisi geografisnya menjadi strategi nasional melalui lensa geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi (G3). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka komparatif atas empat kasus, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura, berdasarkan literatur akademik, putusan hukum internasional, dan dokumen kebijakan kawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa warisan kolonial dan Perang Dingin membentuk kawasan sebagai rimland maritim yang rentan menjadi arena rivalitas kekuatan besar kawasan ini menempati posisi pivot Indo-Pasifik karena menguasai chokepoint utama seperti Selat Malaka ketergantungan ekonomi yang saling terkait memberi peluang sekaligus kerentanan, terutama terhadap instrumen economic statecraft dan pilihan strategis berupa hedging, balancing, atau non-alignment tidak ditentukan oleh geografi semata, melainkan oleh rezim politik domestik. Singapura dengan dominasi partai menjalankan hedging yang terkalibrasi, Malaysia dengan sistem parlementer konsosiasional menjalankan hedging yang menyeimbangkan banyak mitra, Indonesia dengan presidensialisme multipartai mempertahankan otonomi strategis melalui politik bebas aktif, sedangkan Filipina berayun antara akomodasi dan penyeimbangan mengikuti pergantian presiden. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsistensi strategi negara kecil dan menengah di Asia Tenggara bergantung pada kapasitas institusi domestik dalam merumuskan kepentingan nasional jangka panjang.

Kata kunci: Asia Tenggara, geopolitik, geoekonomi, geostrategi, hedging

Abstract

This article analyzes how Southeast Asian states convert their geographical position into national strategy through the lens of geopolitics, geo-economics, and geostrategy. Using a qualitative comparative literature review of Indonesia, the Philippines, Malaysia, and Singapore, it draws on academic works, international legal rulings, and regional policy documents. The findings show that colonial and Cold War legacies shaped the region as a maritime rimland prone to great-power rivalry the region holds a pivotal Indo-Pacific position because it controls key chokepoints such as the Strait of Malacc economic interdependence offers both opportunities and vulnerabilities, particularly to economic statecraft and strategic choices among hedging, balancing, and non-alignment are shaped not by geography alone but by domestic political regimes. Singapore, under dominant-party rule, pursues calibrated hedging; Malaysia, under a consociational parliamentary system, hedges across many partners; Indonesia, under multiparty presidentialism, preserves strategic autonomy through its free-and-active doctrine; and the Philippines oscillates between accommodation and balancing with each change of president. The article concludes that the consistency of small and middle power strategy in Southeast Asia depends on domestic institutional capacity to define long-term national interests.

Keywords: Southeast Asia, geopolitics, geo-economics, geostrategy, hedging

PENDAHULUAN

Asia Tenggara bukan sekadar wilayah geografis, melainkan kategori analitis yang terbentuk oleh sejarah. Istilah “Southeast Asia” baru dipakai secara luas pada masa Perang Dunia II, ketika Sekutu membentuk komando militer khusus untuk kawasan tersebut, dan kemudian dilembagakan oleh kebutuhan strategis Perang Dingin (Emmerson, 1984). Kawasan ini tersusun dari bekas koloni Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol-Amerika Serikat, dan Portugal, serta Siam yang tidak pernah dijajah secara formal (Osborne, 2016). Warisan tersebut meninggalkan batas wilayah yang diwariskan, birokrasi yang dibentuk untuk kepentingan ekstraksi, dan masyarakat yang plural secara etnis, sehingga membentuk cara negara-negara pascakolonial memandang kedaulatan dan keamanan.

Posisi geografis kawasan ini kini semakin menentukan. Asia Tenggara menjadi simpul jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, melalui Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, kemunculan konsep Indo-Pasifik, serta pembentukan QUAD dan AUKUS menjadikan kawasan ini pivot sekaligus arena. ASEAN merespons melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada 2019 yang menekankan inklusivitas dan sentralitas ASEAN. Pada saat yang sama, kompetisi tidak hanya berlangsung di bidang militer, tetapi juga di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, dan mineral kritis. Inilah yang oleh Luttwak (1990) disebut transisi dari geopolitik ke geoekonomi, yakni logika konflik yang dijalankan dengan tata bahasa perdagangan.

Meski menghadapi tekanan struktural yang serupa, respons negara-negara Asia Tenggara berbeda-beda. Singapura dan Malaysia sering dibaca sebagai penganut hedging terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat (Kuik, 2008), dan kajian terbaru menunjukkan bahwa hedging tetap bertahan di tengah rivalitas yang menajam (Wong, 2025). Indonesia menekankan politik luar negeri bebas aktif, sedangkan Filipina memperlihatkan perubahan arah yang tajam antara pemerintahan Duterte dan Marcos Jr. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: mengapa negara-negara dengan lingkungan strategis yang sama menempuh strategi yang berbeda? Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menguji dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana lensa geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi menjelaskan posisi Asia Tenggara dalam rivalitas kekuatan besar, dan bagaimana sistem politik domestik membentuk pilihan strategis Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Tujuan artikel ini adalah (1) menjelaskan pembentukan kawasan dan warisan historisnya, (2) memetakan dimensi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi kawasan, dan (3) membandingkan empat negara untuk menunjukkan bagaimana rezim politik domestik

memengaruhi konsistensi strategi. Argumen utamanya adalah bahwa geografi menyediakan peluang dan kendala, tetapi institusi politik domestiklah yang menentukan bagaimana peluang itu diolah menjadi strategi.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori Geopolitik klasik dan critical geopolitics

Tradisi geopolitik klasik menempatkan geografi sebagai penentu kekuatan negara. Mahan (1890) menekankan sea power, yakni penguasaan jalur laut dan pangkalan sebagai sumber kekuatan nasional. Mackinder (1904) mengajukan teori heartland, bahwa penguasa jantung Eurasia memiliki keunggulan strategis. Spykman (1944) mengoreksinya melalui teori rimland, dengan argumen bahwa wilayah pinggiran Eurasia, bukan jantungnya, yang menjadi kunci kekuasaan. Cohen (2015) kemudian membagi dunia ke dalam region geopolitik yang saling terkait. Asia Tenggara, yang menjadi sabuk maritim di tepi Eurasia, secara klasik adalah rimland.

Pendekatan klasik dikritik oleh critical geopolitics karena cenderung deterministik dan menaturalisasi kepentingan kekuatan besar. Ó Tuathail (1996) menunjukkan bahwa peta, istilah, dan klaim geografis adalah konstruksi wacana yang melayani kekuasaan. Kritik ini relevan karena konsep seperti “Indo-Pasifik” dan “Asia Tenggara” sendiri adalah kategori buatan yang membawa kepentingan tertentu (Emmerson, 1984). Artikel ini memakai geopolitik klasik sebagai peta struktur, dan critical geopolitics sebagai pengingat bahwa aktor domestik menafsirkan struktur tersebut.

Geoekonomi dan weaponized interdependence

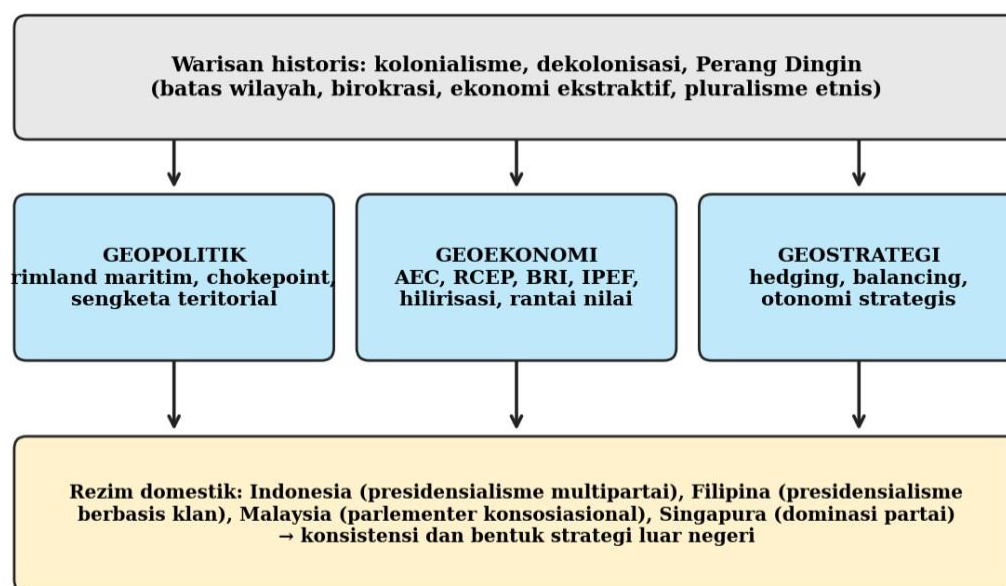
Luttwak (1990) berargumen bahwa setelah Perang Dingin, persaingan negara beralih dari kekuatan militer ke instrumen ekonomi. Blackwill dan Harris (2016) mengembangkan gagasan ini sebagai economic statecraft, yakni penggunaan perdagangan, investasi, sanksi, bantuan, energi, dan kebijakan keuangan sebagai “perang dengan cara lain”. Farrell dan Newman (2019) menambahkan konsep weaponized interdependence: negara yang menguasai simpul jaringan global, seperti rantai pasok, sistem keuangan, dan data, dapat memakai posisi itu untuk memaksa pihak lain. Bagi negara Asia Tenggara, keterikatan pada rantai nilai global bersifat menguntungkan sekaligus rentan. Literatur developmental state menjelaskan mengapa kawasan ini tumbuh pesat melalui intervensi negara dalam industrialisasi berorientasi ekspor (Woo-Cumings, 1999), tetapi posisi kawasan dalam rantai nilai global juga memunculkan persoalan middle income trap.

Geostrategi: hedging, balancing, dan bandwagoning

Geostrategi menghubungkan tujuan nasional dengan sumber daya dan posisi geografis. Bagi negara kecil dan menengah, pilihan strategis utama mencakup balancing (menyeimbangkan kekuatan dominan), bandwagoning (bergabung dengan kekuatan dominan), non-alignment, dan hedging. Kuik (2008) mendefinisikan hedging sebagai perilaku yang menolak memilih salah satu sisi secara tegas, dengan mempertahankan keterlibatan ekonomi dengan satu kekuatan sambil menjaga jaminan keamanan dari kekuatan lain. Kuik (2016) kemudian menunjukkan bahwa hedging bervariasi, dan bahwa variasinya dipengaruhi oleh kalkulasi domestik, bukan hanya tekanan eksternal. Edisi khusus *Contemporary Southeast Asia* tentang determinan domestik hubungan Asia Tenggara dengan Amerika Serikat dan Tiongkok memperkuat argumen ini, karena menunjukkan bahwa kekhawatiran elite tentang keamanan ekonomi, legitimasi politik, dan stabilitas regional memediasi cara negara kecil merespons rivalitas (Huang & Ho, 2024). Gagasan ini menjadi jangkar kerangka analisis artikel ini.

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini menyusun kerangka bahwa warisan historis membentuk struktur kawasan, struktur itu dibaca melalui tiga lensa (geopolitik, geoekonomi, geostrategi), dan rezim politik domestik menjadi variabel perantara yang menentukan bentuk serta konsistensi strategi (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Analisis



Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka komparatif. Data sekunder dikumpulkan dari buku akademik, artikel jurnal, putusan hukum internasional, dan dokumen kebijakan kawasan. Empat kasus dipilih secara purposif: Indonesia dan Filipina mewakili demokrasi elektoral kepulauan dengan sistem presidensial, sedangkan Malaysia dan Singapura mewakili sistem parlementer dengan dominasi partai. Keempatnya sama-sama berada di jalur maritim strategis, tetapi berbeda dalam rezim politik dan postur strategis, sehingga cocok untuk membandingkan peran variabel domestik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga lensa G3, kemudian dibandingkan lintas kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan historis: dari koloni ke arena Perang Dingin

Pola kolonialisme yang berbeda menghasilkan warisan kelembagaan yang berbeda. Belanda membangun ekonomi ekstraktif di Hindia Belanda, Inggris menata Malaya dan Singapura sebagai simpul perdagangan dan komoditas dengan masyarakat yang tersegmentasi secara etnis, sedangkan Filipina melewati kolonialisme Spanyol dan Amerika Serikat yang meninggalkan elite tanah dan institusi elektoral lebih awal (Osborne, 2016). Siam, yang tidak terjajah, bertahan sebagai negara penyangga di antara kekuatan Inggris dan Prancis. Batas wilayah yang ditarik kolonial menyisakan sengketa yang bertahan hingga sekarang, dan pluralisme etnis yang dikelola secara berbeda oleh masing-masing negara.

Perang Dingin kemudian menarik kawasan ini ke dalam kompetisi global. Teori domino mendorong pembentukan SEATO (1954) dan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, sementara Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963–1966) menunjukkan bahwa konflik antarnegara baru juga dipicu oleh dekolonisasi yang belum tuntas. Dari pengalaman ini lahir ASEAN (1967) sebagai upaya meredam konflik antaranggota (Acharya, 2014). Setelah itu, narasi “dari dominoes ke dynamos” menggambarkan transformasi kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, hingga krisis moneter 1997–1998 menguji model tersebut. Krisis itu menjatuhkan rezim Soeharto di Indonesia, namun tidak serta-merta menghapus otoritarianisme di kawasan, yang bertahan dalam berbagai bentuk (Slater, 2010).

Dimensi geopolitik: rimland maritim dan pivot Indo-Pasifik

Dalam kerangka Spykman (1944), Asia Tenggara adalah rimland maritim yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania. Nilai strategis terpusat pada chokepoint: Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Teluk Thailand. Selat Malaka menjadi jalur utama energi dan perdagangan menuju Asia Timur, sehingga kontrol dan keamanannya menyangkut kepentingan banyak negara di luar kawasan. Dalam kerangka Mahan (1890), kemampuan mengamankan jalur laut adalah sumber kekuasaan, dan hal ini menjelaskan mengapa Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangat memperhatikan keamanan maritim di sekitar selat.

Konsep Indo-Pasifik menempatkan kawasan ini di titik temu dua samudra. Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia mengembangkan QUAD, sedangkan AUKUS (2021) menambah dimensi kapabilitas militer di kawasan. ASEAN merespons dengan AOIP (2019) yang menolak logika blok dan menegaskan kerja sama terbuka. Namun, kritik critical geopolitics mengingatkan bahwa penamaan “Indo-Pasifik” juga membawa kepentingan strategis aktor yang mengusungnya (Ó Tuathail, 1996). Dalam praktiknya, sentralitas ASEAN diuji oleh perbedaan posisi anggotanya.

Sengketa teritorial memperlihatkan wajah konkret persaingan ini. Di Laut China Selatan, klaim sembilan garis putus Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan klaim Indonesia di Laut Natuna Utara. Pada 2016, tribunal arbitrase menyatakan bahwa klaim hak historis Tiongkok atas sumber daya dalam sembilan garis putus tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS (Permanent Court of Arbitration, 2016). Tiongkok menolak putusan tersebut, sehingga kasus ini menunjukkan keterbatasan hukum internasional ketika tidak ditopang oleh kekuatan. Sengketa lain, seperti Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja serta klaim Filipina atas Sabah, menunjukkan bahwa warisan batas

kolonial masih memengaruhi hubungan antarnegara.

Dimensi geoekonomi: peluang dan kerentanan interdependensi

Arsitektur ekonomi kawasan berlapis: ASEAN Economic Community (AEC) sebagai integrasi internal, RCEP dan CPTPP sebagai kerangka perdagangan yang lebih luas, IPEF sebagai inisiatif Amerika Serikat, dan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai kerangka pembiayaan infrastruktur Tiongkok. Negara-negara Asia Tenggara berpartisipasi di beberapa kerangka sekaligus, sehingga ekonomi kawasan tidak terkunci pada satu poros. Posisi ini sejalan dengan logika hedging, namun juga menimbulkan ketergantungan pada rantai pasok yang melewati simpul-simpul yang dikuasai kekuatan besar (Farrell & Newman, 2019).

Dalam kerangka Blackwill dan Harris (2016), instrumen geoekonomi mencakup perdagangan, investasi, infrastruktur, bantuan pembangunan, energi, mineral kritis, standar, dan mata uang. Indonesia memakai instrumen ini secara aktif melalui hilirisasi mineral, terutama nikel, dengan larangan ekspor bijih mentah agar nilai tambah pengolahan tetap berada di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkan ambisi developmental state untuk naik dalam rantai nilai (Woo-Cumings, 1999). Namun, kajian terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok memanfaatkan momentum larangan ekspor tersebut dengan membangun usaha patungan di sektor pengolahan dan pemurnian, sehingga hilirisasi memunculkan pertanyaan tentang ketergantungan pada modal dan teknologi asing (Riedho, 2024). Singapura, sebaliknya, memperkuat posisi sebagai hub keuangan dan entrepot, sehingga kepentingannya terletak pada keterbukaan jalur dan sistem perdagangan.

Perdebatan tentang debt-trap diplomacy menunjukkan bahwa interpretasi geoekonomi sendiri bersifat politis. Sebagian pengamat menilai pembiayaan BRI sebagai jerat utang yang menciptakan leverage strategis, sedangkan yang lain menilai bahwa posisi tawar negara penerima lebih menentukan hasil proyek daripada niat pemberi pinjaman. Artikel ini tidak adjudikasi perdebatan tersebut, tetapi mencatat bahwa persoalan domestik seperti korupsi, informalitas, ketimpangan, dan kerentanan fiskal memengaruhi seberapa besar negara dapat memperoleh manfaat dari kerja sama ekonomi tanpa kehilangan otonomi.

Dimensi geostrategi: pilihan strategis dan isu keamanan

Negara kecil dan menengah memiliki sumber daya terbatas, sehingga pilihan strategis yang tersedia terbatas pula. Dalam hal ancaman konvensional, isu utama mencakup sengketa teritorial, modernisasi alutsista yang menimbulkan dilema keamanan, kehadiran militer asing, serta aliansi dan pakta pertahanan. Dalam hal ancaman non-konvensional, kawasan

menghadapi terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi, penipuan daring di wilayah perbatasan, serangan siber dan disinformasi, IUU fishing dan perompakan, keamanan energi, pangan, dan air (termasuk persoalan Sungai Mekong), kabut asap lintas batas, bencana, pandemi, serta migrasi paksa. ASEAN merespons melalui mekanisme seperti AMMTC, ADMM-Plus, ARF, AHA Centre, dan ASEAN Convention on Counter Terrorism, tetapi kerja sama ini umumnya bersifat koordinatif dan tidak mengikat secara kuat.

Pilihan strategis tiap negara dapat dibaca melalui perbandingan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1 membandingkan karakter rezim politik domestik, sedangkan Tabel 2 memetakan lensa G3 dan postur strategi masing-masing negara.

Tabel 1. Perbandingan Rezim Politik Domestik Empat Negara

Aspek	Indonesia	Filipina	Malaysia	Singapura
Sistem pemerintahan	Presidensial, multipartai kesatuan	Presidensial, Konstitusi 1987	Parlementer, monarki konstitusional federal	Parlementer, dominasi satu partai
Karakter kekuasaan	Koalisi besar, oligarki, dinasti politik	Klan politik, patronase, pork barrel	Konsosiasionalisme etnis, kebijakan afirmasi Bumiputera	Meritokrasi, GRC, kontrol legislatif
Dinamika politik	Pemilu serentak, relasi Presiden-DPR bergantung koalisi	Populisme Duterte, restorasi Marcos Jr.	Pergantian pemerintahan sejak 2018	Suksesi terkelola dalam PAP
Implikasi bagi strategi	Otonomi strategis, tetap arah dipengaruhi koalisi elite	Arah berubah mengikuti presiden	Hedging berlapis, stabilitas koalisi memengaruhi konsistensi	Konsistensi tinggi, keputusan terpusat

Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

Tabel 2. Lensa G3 dan Postur Strategi Empat Negara

Negara	Geopolitik	Geoekonomi	Geostrategi
Indonesia	Poros maritim dunia; Selat Sunda, Lombok, Makassar; Laut Natuna Utara	Hilirisasi mineral; peserta RCEP; mitra banyak pihak	Bebas aktif; sentralitas ASEAN; otonomi strategis
Filipina	Sengketa Laut China Selatan; Putusan Arbitrase 2016	Ketergantungan perdagangan pada banyak mitra; investasi infrastruktur	Berayun: akomodasi (Duterte) lalu penyeimbangan melalui EDCA (Marcos Jr.)

Negara	Geopolitik	Geoekonomi	Geostrategi
Malaysia	Selat Malaka; klaim di Laut China Selatan; sengketa Sabah	Ekonomi terbuka; Tiongkok mitra dagang utama	Hedging: keterlibatan ekonomi luas, keamanan tidak terikat blok

Singapura	Pintu Selat Malaka; hub pelayaran	Entrepot dan hub keuangan; ketergantungan pada keterbukaan sistem	Hedging terkalibrasi: hubungan keamanan dengan AS, hubungan ekonomi luas dengan Tiongkok
------------------	-----------------------------------	---	--

Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

Perbandingan empat kasus

Singapura menunjukkan konsistensi strategi tertinggi. Dominasi People's Action Party (PAP) yang berlangsung lama, sistem Group Representation Constituency (GRC), kontrol atas media dan ruang sipil, serta suksesi kepemimpinan yang terkelola menghasilkan pengambilan keputusan yang terpusat dan dapat diprediksi (Mauzy & Milne, 2002; Slater, 2010). Kapasitas birokrasi dan pengendalian korupsi yang kuat mendukung strategi menjaga keterbukaan jalur perdagangan dan menyeimbangkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok (Kuik, 2008). Kajian terbaru menegaskan bahwa kebutuhan melegitimasi dominasi PAP turut membentuk strategi hedging Singapura, sehingga politik domestik tidak dapat dikesampingkan (Lee, 2024). Dalam hal ini, rezim dominan partai berfungsi sebagai penopang kesinambungan strategi, dengan harga berupa ruang oposisi yang terbatas (Rodan, 2018).

Malaysia memperlihatkan hedging yang berlapis, tetapi kesinambungannya lebih bergantung pada stabilitas koalisi. Sistem Westminster yang dikombinasikan dengan monarki federal dan konsosiasionalisme etnis (Lijphart, 1977) menghasilkan kebijakan afirmasi Bumiputera yang membentuk politik domestik. Pergantian pemerintahan sejak 2018, ketika koalisi yang lama berkuasa kehilangan mayoritas untuk pertama kali sejak kemerdekaan, menunjukkan bahwa dominasi lama tidak lagi menjamin keberlanjutan. Namun, strategi luar negeri Malaysia cenderung stabil karena kerangka hedging telah mengakar sebagai konsensus elite lintas koalisi. Kuik (2024) menjelaskan bahwa posisi "ekuidistan" Malaysia di tingkat makro didorong oleh kebutuhan melindungi diri dari risiko sistemik, sedangkan kemitraan berlapis di tingkat mikro terutama dipengaruhi kebutuhan elite memelihara berbagai jalur legitimasi dalam masyarakat multietnis (Kuik, 2008; Weiss, 2020).

Indonesia mempertahankan otonomi strategis melalui doktrin bebas aktif dan menempatkan diri sebagai poros maritim sekaligus penjaga sentralitas ASEAN. Namun, presidensialisme multipartai menuntut presiden membangun koalisi besar, sehingga relasi Presiden-DPR dan proses legislasi dipengaruhi tawar-menawar elite. Oligarki dan politik uang dalam pemilu serentak turut membentuk ruang kebijakan (Hadiz & Robison, 2004; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam bidang geoekonomi, hilirisasi mineral menunjukkan kapasitas

negara menetapkan agenda, tetapi pelaksanaannya bergantung pada koordinasi antar-aktor dan modal asing. Priamarizki (2024) menunjukkan bahwa agenda domestik, termasuk kepentingan politisi dan opini publik, menghasilkan variasi perilaku hedging Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan demikian, otonomi strategis Indonesia tinggi pada tingkat doktrin, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi struktur koalisi domestik.

Filipina memperlihatkan kasus paling jelas tentang bagaimana politik domestik membentuk strategi. Presidensialisme berdasarkan Konstitusi 1987, yang lahir dari People Power, menghasilkan eksekutif yang kuat sementara hubungan Presiden-Kongres diwarnai patronase, pork barrel, dan politik klan (Hutchcroft, 1998; Sidel, 1999). Pada masa Duterte, pemerintah menunda pemanfaatan Putusan Arbitrase 2016 dan mendekat ke Tiongkok untuk mengejar investasi, sedangkan pada masa Marcos Jr., Filipina memperluas penerapan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dengan Amerika Serikat dan lebih tegas menyuarkan klaim maritim. De Castro (2024) mencatat rangkaian perubahan ini: penyeimbangan keras pada masa Aquino, kebijakan akomodasi pada awal pemerintahan Duterte, penyeimbangan terbatas sejak 2018, lalu penyeimbangan keras pada masa Marcos Jr. setelah sikap Tiongkok di Laut China Selatan tidak berubah. Bautista dan Candelaria (2025) menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Marcos Jr. juga berfungsi sebagai alat legitimasi domestik di tengah retaknya aliansi “UniTeam”. Perlu dicatat bahwa Quilop (2024) berpendapat tiga pilar kebijakan luar negeri Filipina, yaitu kedaulatan wilayah, pembangunan ekonomi, dan perlindungan warga di luar negeri, relatif konstan sejak era Ramos. Dengan demikian, yang berubah adalah pilihan instrumen dan mitra, bukan tujuan dasarnya. Perubahan ini terjadi tanpa perubahan geografi, sehingga mendukung argumen bahwa preferensi pemimpin dan struktur politik domestik menentukan postur strategi.

Refleksi: apa yang menjelaskan konsistensi strategi?

Perbandingan di atas memperlihatkan pola yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, geografi yang sama tidak menghasilkan strategi yang sama. Keempat negara berada di jalur maritim strategis, tetapi postur strateginya berbeda. Kedua, konsistensi strategi tertinggi terdapat pada rezim dengan pengambilan keputusan terpusat (Singapura), sedangkan strategi paling berubah-ubah terdapat pada rezim dengan eksekutif kuat tetapi tidak terlembaga secara programatik (Filipina). Ketiga, hedging tidak berarti ketiadaan strategi, melainkan strategi yang membutuhkan kapasitas diplomatik dan konsensus elite agar dapat dijalankan dengan konsisten (Kuik, 2016). Keempat, bagi negara yang demokrasi elektoralnya kompetitif (Indonesia dan Filipina), tantangan utamanya adalah menjaga agar pergantian pemerintahan tidak mengganggu

kesinambungan kepentingan nasional jangka panjang.

Temuan ini tidak berarti bahwa rezim terpusat lebih baik. Konsistensi strategi Singapura dibayar dengan ruang sipil yang terbatas, sedangkan fluktuasi strategi di negara demokratis mencerminkan kompetisi politik yang nyata. Artikel ini hanya menegaskan bahwa kualitas strategi bergantung pada kapasitas institusi untuk menerjemahkan kepentingan nasional menjadi kebijakan yang berkesinambungan, apa pun bentuk rezimnya. Keterbatasan artikel ini adalah dasar data yang bersifat sekunder dan jumlah kasus yang terbatas, sehingga generalisasi ke seluruh anggota ASEAN perlu dilakukan dengan hati-hati.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara dapat dipahami sebagai rimland maritim dan pivot Indo-Pasifik yang dibentuk oleh warisan kolonial dan Perang Dingin. Melalui lensa geopolitik, kawasan ini bernilai strategis karena chokepoint dan menjadi lokasi sengketa teritorial. Melalui lensa geoekonomi, keterikatan pada berbagai arsitektur ekonomi memberi peluang pertumbuhan sekaligus kerentanan terhadap economic statecraft. Melalui lensa geostrategi, negara-negara kecil dan menengah memilih di antara hedging, balancing, dan non-alignment.

Perbandingan Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa pilihan strategis tidak ditentukan geografi semata, melainkan oleh rezim politik domestik. Singapura menjalankan hedging terkalibrasi yang ditopang pemerintahan terpusat, Malaysia menjalankan hedging berlapis yang bertumpu pada konsensus elite, Indonesia mempertahankan otonomi strategis melalui politik bebas aktif yang pelaksanaannya dipengaruhi koalisi, dan Filipina berayun mengikuti pergantian presiden. Implikasinya, penguatan kapasitas institusi domestik, termasuk birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan konsensus elite mengenai kepentingan nasional, sama pentingnya dengan kecermatan membaca lingkungan strategis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kasus ke Vietnam, Thailand, dan negara daratan lain di kawasan, serta menguji temuan ini dengan data primer seperti wawancara pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

- Bautista, L., & Candelaria, N. (2025). Tightrope diplomacy: Philippine foreign policy recalibration under Marcos Jr. amid South China Sea tensions and political rifts. In *Southeast Asian Affairs 2025*. ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.
- Cohen, S. B. (2015). *Geopolitics: The geography of international relations* (3rd ed.). Rowman & Littlefield.
- De Castro, R. C. (2024). The Philippines' evolving grand strategy in confronting China's maritime expansion in the South China Sea. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1).
- Emmerson, D. K. (1984). "Southeast Asia": What's in a name? *Journal of Southeast Asian Studies*, 15(1), 1–21.
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Huang, C.-H., & Ho, S. (2024). Introduction: Domestic determinants of Southeast Asia's relations with the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1).
- Hutchcroft, P. D. (1998). *Booty capitalism: The politics of banking in the Philippines*. Cornell University Press.
- Kuik, C.-C. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185.
- Kuik, C.-C. (2024). Explaining hedging: The case of Malaysian equidistance. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1).
- Kuik, C.-C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514.
- Lee, T. (2024). The domestic determinants of hedging in Singapore's foreign policy. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1).
- Lijphart, A. (1977). *Democracy in plural societies: A comparative exploration*. Yale University Press.
- Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. *The National Interest*, 20, 17–23.
- Mackinder, H. J. (1904). The geographical pivot of history. *The Geographical Journal*, 23(4), 421–437.
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown and Company.
- Mauzy, D. K., & Milne, R. S. (2002). *Singapore politics under the People's Action Party*.

Routledge.

Ó Tuathail, G. (1996). *Critical geopolitics: The politics of writing global space*. University of Minnesota Press.

Osborne, M. (2016). *Southeast Asia: An introductory history* (12th ed.). Allen & Unwin.

Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, PCA Case No. 2013-19, Award of 12 July 2016.

Priamarizki, A. (2024). Understanding the domestic determinants of Indonesia's hedging policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1).

Quilop, R. J. (2024). Consistency amid seeming shifts: Philippine foreign policy between the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1).

Riedho, M. R. Z. (2024). Strategi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(1).

Rodan, G. (2018). *Participation without democracy: Containing conflict in Southeast Asia*. Cornell University Press.

Sidel, J. T. (1999). *Capital, coercion, and crime: Bossism in the Philippines*. Stanford University Press.

Slater, D. (2010). *Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Spykman, N. J. (1944). *The geography of the peace*. Harcourt, Brace and Company.

Weiss, M. L. (2020). *The roots of resilience: Party machines and grassroots politics in Southeast Asia*. Cornell University Press.

Wong, P. N. (2025). Toward a futurist approach to hedging strategy in Southeast Asia: Anticipations and strategic decision-making in a Taiwan contingency. *Frontiers in Political Science*, 7, 1598976. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1598976>

Woo-Cumings, M. (Ed.). (1999). *The developmental state*. Cornell University Press.